

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 2021

OPD : DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

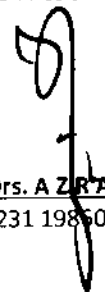
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan : Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya Tujuan : Meningkatkan kualitas dan varian produk IKM	- Undang - Undang Nomor : 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. - Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah IKM di Pesisir Selatan berjumlah 2.473 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi industri : Industri Sandang dan Kulit 276 IKM, Industri Pangan 1031, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 910 IKM, Industri Logam dan elektronika 100 IKM. - Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan atau dikonsumsi. Legalitas produk salah satu penentu	Akses : - Kurangnya informasi tentang halal, Legalitas Merek Dagang (HKI) dan Izin edar bagi Pelaku IKM - Kurangnya pengetahuan pelaku IKM tentang diversifikasi produk potensi daerah Partisipasi : - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengurusan Sertifikat Halal, legalisasi merek dagang (HKI) dan Izin edar - Kurangnya partisipasi pelaku IKM dalam pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk	1. Masih rendahnya alokasi anggaran khususnya untuk pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Halal dan HKI produk IKM. 2. Pelaku IKM yang dibina tersebar dan daerahnya luas. 3. Jumlah SDM bidang perindustrian kurang/sedikit untuk memberikan pembinaan dan pengawasan produk IKM 4. Untuk industri kimia dan bahan bangunan tertentu, masalah gender masih	1. Jarak tempuh dari lokasi IKM ke lokasi Dinas/Kantor Pengelola legalitas yang jauh. 2. Usaha yang dikelola IKM merupakan usaha sampingan sehingga mereka menganggap legalitas usaha tidak terlalu penting 3. Kurangnya informasi akan pentingnya legalitas usaha bagi IKM . 4. Pimpinan dari IKM lebih sering mengirim pegawainya dalam acara sosialisasi sehingga informasi yang diberikan tidak tepat sasaran. 5. Minimnya pelatihan untuk mengupgrade wawasan	Meningkatnya kualitas dan varian produk IKM yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan.	- Melakukan pembinaan sekaligus pendataan produk-produk yang layak untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan HKI (Pendaftaran Merk), Berpotensi mendapatkan Izin edar MD BPOM - Melakukan pembinaan sekaligus pendataan jenis produk baru IKM yang masih bisa dikembangkan dan potensial dari sisi bahan baku maupun kemampuan tenaga kerja - Melakukan pengawasan terhadap pengolahan produk IKM. - Melakukan sosialisasi tentang Sertifikat Halal dan Izin edar MD BPOM	- Data pada tahun 2019 jumlah IKM di Pesisir Selatan berjumlah 2.473 IKM yang dibagi menjadi 5 (lima) klasifikasi industri : Industri Sandang dan Kulit 276 IKM, Industri Pangan 1031, Industri Kerajinan 156, Industri Kimia dan Bangunan 910 IKM, Industri Logam dan elektronika 100 IKM. Pada saat ini masyarakat/ konsumen sudah mulai cerdas dalam menentukan produk yang digunakan atau	- Jumlah IKM yang dibina. - Jumlah IKM yang diawasi. - Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi. - Jumlah IKM yang dievaluasi untuk pengurusan sertifikasi halal dan HKI. - Jumlah IKM yang difasilitasi - Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan diversifikasi produk - Jumlah inovasi/ diversifikasi produk

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
	mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan nilai gizi yang terdapat pada produk. - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga dituntut bagi IKM. Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.473 IKM tersebut yang memiliki sertifikat halal hanya 35 produk,	Kontrol : - Perlunya pemahaman kepada pelaku IKM terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal, Legalisasi Merk Dagang (HKI) serta Izin Edar guna melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk itu sendiri. - Perlunya upgrade wawasan pelaku IKM mengenai pengembangan produk, diversifikasi dan inovasi produk Manfaat: - Dengan adanya legalitas produk : 1. Sertifikat Halal dan Izin Edar : - Kenyamanan dan keamanan konsumen	dipertimbangkan	pelaku IKM dalam diversifikasi produk		- Melakukan evaluasi terhadap IKM yang mendapatkan sosialisasi tersebut. - Memfasilitasi pengurusan Sertifikat Halal dan HKI.	dikonsumsi. Legalitas produk salah satu penentu mutu produk, misalnya sertifikasi halal, legalitas merk dagang (HKI), izin edar produk (MD/ P-IRT), SNI untuk produk tertentu serta kandungan nilai gizi yang terdapat pada produk. - Kemudian legalisasi Industri berupa Izin Usaha Industri (IUI) juga dituntut bagi IKM. Izin Usaha Industri (IUI) diwajibkan untuk menjamin keberadaan IKM tersebut diterima baik secara	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
	legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek. Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 5 produk berinformasi nilai gizi. - Penerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dari semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua dan muda.	akan meningkat. - Daya beli masyarakat meningkat. - Omset meningkat - Memperluas Market share 2. Legalitas merek Dagang (HKI) - Mempunyai brand sendiri dan tidak ada yang bisa menyamai dengan brand yang lain. - Merk dan produk bisa dikenal luas oleh masyarakat. - Omset meningkat - Dengan adanya pelatihan diversifikasi produk pangan : 1. Meningkatnya jumlah varian produk yang beredar di pasaran 2. Omset IKM meningkat					lingkungan (tidak mencemari lingkungan) serta lokasi yang memenuhi kriteria perencanaan tata ruang dan wilayah - Dari 2.473 IKM tersebut yang memiliki sertifikat halal hanya 35 produk, legalitas merek (HKI) yang sudah terbit dan masih berlaku hanya 1 merek. Sedangkan untuk SNI belum ada produk SNI wajib serta 5 produk berinformasi nilai gizi. - Penerima manfaat produk IKM adalah masyarakat dari	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		3. Memperluas segmen pasar dan market share					semua kalangan baik perempuan, laki-laki, anak-anak, tua dan muda.	

Painan, Maret 2020
Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan


Drs. A ZRAL

NIP. 19621231 198502 1 039